

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai perusahaan yang seringkali dikorelasikan dengan harga saham, merupakan persepsi investor terhadap perusahaan (Sutrisno & Fella, 2020). Kenaikan harga saham merupakan salah satu faktor meningkatnya nilai Perusahaan. Perusahaan juga terus meningkatkan nilai perusahaannya, jika perusahaan bisa meningkatkan nilai usahanya, berarti pula meningkatkan tujuan utama pada usahanya. Hal ini merupakan pencapaian penting yang memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, karena kesejahteraan pemilik meningkat seiring dengan nilai perusahaan.

Modigliani & Miller (1996), nilai suatu perusahaan didasarkan pada *earning power* dari asetnya. Tinggi rendahnya memperoleh keuntungan dipengaruhi oleh dua faktor: pertama *profit margin*, yaitu perbandingan laba bersih menggunakan penjualan neto serta kedua *turnover of operating asset*, yaitu kecepatan perputaran aset operasi yang dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan total aset. Rasio yang digunakan untuk menilai kinerja saham perusahaan yang di perdagangkan di pasar modal adalah rasio penilaian (Sudana & Arlindania W, 2011).

Praktik tata kelola perusahaan diyakini dapat meningkatkan nilai perusahaan (Syamsudin et al., 2017). Salah satu komponen dari *corporate governance* yaitu adanya dewan di perusahaan. Suatu perusahaan membutuhkan komite audit, dewan komisaris, dan dewan direksi untuk menerapkan *corporate governance* (Sutrisno & Fella, 2020). Untuk menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan

oleh manajemen dapat mengoptimalkan keuntungan bagi pemegang saham, dewan yang mewakili seluruh pemegang saham bertugas mengawasi, mengevaluasi, dan memberi nasihat kepada manajemen (Sitthipongpanich & Polsiri, 2013).

Nilai perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan tiga cara yaitu *Price Earning Ratio* (PER) adalah rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan laba per lembar saham (Sondakh & Morasa, 2019). Kedua *Tobin's Q* yang mengukur seberapa baik manajemen menangani aset Perusahaan dan kinerja, khususnya nilai perusahaan (Sudiyatno & Puspitasari, 2010). Ketiga *Price to Book Value* (PBV), yaitu perbandingan antara nilai buku per saham dengan harga saham, rasio ini menunjukkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan (Qori'ah, 2019).

Laporan keuangan dari perusahaan dipengaruhi oleh keragaman gender pada manajemen puncak (Krishnan & Parsons, 2008). Gender mengacu pada perbedaan antara perempuan serta laki-laki jika dilihat dari sudut nonbiologisnya, seperti ciri budaya, sosial, dan perilaku (Muthmainah, 2007). Dilihat dari literatur psikologi ada perbedaan antara laki-laki serta perempuan pada gaya kepemimpinannya. Perbedaan ini terlihat jelas dalam cara orang berkomunikasi, perilaku kehati-hatian, dan mengambil keputusan (Peni & Vähämaa, 2010). Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan biasanya lebih berhati-hati, menghindari risiko, dan mempunyai standar yg lebih tinggi (Setyaningrum et al., 2019).

Dewan dapat dianggap lebih seimbang dan efektif jika anggotanya memiliki latar belakang yang beragam (Abdullah, 2014). *Women on board of commissioner*

(WOMC) melihat pada jajaran wanita yang menduduki kursi dewan komisaris, sedangkan *Women on board of director* (WOMD) melihat pada jajaran wanita yang menduduki kursi dewan direksi, ini adalah salah satu dilema terkait dengan diversifikasi dewan (Syamsudin et al., 2017). Selain membuat dewan perusahaan lebih beragam, kehadiran perempuan di dewan perusahaan dapat dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan *corporate governance* dalam situasi di mana laki-laki mendominasi dewan.

Menurut penelitian Khairani & Harahap (2017) dan Sutrisno & Fella (2020) menemukan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan komisaris tidak berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Di sisi lain, penelitian Wijaya & Suprasto (2015) dan Syamsudin et al. (2017) menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian Sutrisno & Fella (2020) melihat bahwa dewan direksi perempuan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Triana & Asri (2017) menemukan bahwa direktur perempuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian Ramdhania et al. (2020) menunjukkan bahwa direktur wanita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Hikmawati (2022) menunjukkan bahwa dewan direksi perempuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dampak lingkungan politik merupakan salah satu dari sekian banyak aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan, selain lingkungan eksternal dan internal. Dunia usaha seringkali memanfaatkan iklim politik untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan modal. Untuk meningkatkan pendapatan dan nilai perusahaan, mereka menggunakan ikatan politik sebagai

taktik. Koneksi politik di dalam perusahaan menjadi salah satu jalur politik yang dimaksud. Pejabat tinggi negara atau anggota partai politik yang memiliki hubungan dengan korporasi, atau bahkan bertindak sebagai eksekutif perusahaan atau investor utama, biasanya terlibat dalam hubungan politik (Faccio, 2006). Melalui adanya sistem etika timbal balik bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan anggota politik, diharapkan hubungan tersebut dapat memberikan manfaat.

Menurut Agrawal & Knoeber (2001), perusahaan yang memiliki ikatan politik seharusnya mengalami peningkatan produktivitas dan pendapatan karena politik merupakan komponen penting dalam perekonomian, khususnya dalam hal profitabilitas bisnis. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik maka perusahaan tersebut mampu memuaskan pemegang saham sehingga mampu mempengaruhi tingkat pasar saham perusahaan (Faccio, 2007). Perusahaan yang beroperasi di negara dengan tingkat korupsi birokrasi yang tinggi, pemerintah yang tidak demokratis, lemahnya perlindungan hak cipta, dan intervensi pemerintah yang besar dapat memperoleh manfaat dari memiliki koneksi politik (Faccio, 2006).

Strategi bersaing perusahaan harus mampu mengenali dan memanfaatkan peluang bisnis melalui hubungan politik (Leuz & Gee, 2006). Menurut Hill (2009), koneksi politik mengacu pada ikatan politik tersembunyi yang terjalin antara manajemen senior dan pejabat pemerintah. Pengamat ekonomi memberikan perhatian khusus terhadap dorongan dunia usaha untuk memiliki koneksi politik karena adanya indikasi perlakuan khusus dari pemerintah. Hal ini khususnya relevan bagi bisnis yang dikendalikan oleh pejabat pemerintah atau mereka yang memegang posisi penting (Faccio, 2006). Menurut Faccio (2006), suatu perusahaan dianggap terhubung secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham utama Perusahaan (seseorang dengan kurang lebih 10% dari

total hak suara) atau salah satu pemimpin Perusahaan (Presiden, Wakil Presiden, Chairman, CEO, atau sekretaris) adalah Menteri atau anggota parlemen. Bisnis yang terhubung secara politik biasanya menerima jaminan dari lembaga pemerintah, memiliki akses mudah terhadap pembiayaan, dan menghadapi lebih sedikit kekhawatiran audit terkait pajak (Kim & Zhang, 2014).

Keuntungan yang mampu didapatkan sebuah perusahaan dengan koneksi politik adalah potensi kemudahan dalam pembayaran pajak yang lebih rendah, perlakuan dari bank pengendali pemerintah, dan memenangkan monopoli pasar (Maaloul et al., 2018). Sedangkan berdasarkan Wijantini (2007) keuntungan perusahaan dengan koneksi politik adalah memenangkan tender proyek dari pemerintah atau akses mudah mendapatkan kontrak usaha. Dunia usaha mungkin diuntungkan atau dirugikan karena memiliki koneksi politik (Kristanto, 2019).

Penelitian yang dilakukan Maaloul et al. (2018) berdasarkan pada *resource dependence theory* (RDT) dan *resource based view* (RBV). Bisnis akan beradaptasi dengan lingkungan eksternal untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya yang dikendalikan pemerintah, menurut RDT. *Resource based view* menegaskan bahwa koneksi politik dipandang sebagai sumber daya tidak berwujud yang memungkinkan bisnis untuk memperoleh dukungan pemerintah untuk meraih keunggulan kompetitif. Penelitian yang dilakukan Maaloul et al. (2018) jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik, perusahaan dengan koneksi politik mempunyai kinerja lebih baik nilai perusahaan yang lebih tinggi. Penelitian Sutrisno & Fella (2020) dan Chen et al. (2017) menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Fanani & Alfianti (2020) menemukan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh terhadap reputasi Perusahaan. Sedangkan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Nugrahanti & Nurfitri (2022) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Jika ada anggota eksekutif dewan direksi atau dewan komisarisnya suatu perusahaan yang pernah bertugas di Angkatan Udara, Angkatan Darat, Marinir, Angkatan laut, atau cabang angkatan bersenjata lainnya, maka korporasi tersebut dianggap memiliki ikatan militer (Ramadhani, 2020). Proses pengambilan keputusan mengenai strategi perusahaan mungkin dipengaruhi oleh kehadiran individu yang memiliki pengalaman militer di dewan direksi dan komisaris. Pengalaman di militer sering kali dikaitkan dengan disiplin yang ketat dan komitmen terhadap peraturan, sehingga dapat menurunkan kemungkinan perilaku kurang disiplin dalam dunia usaha (Ramadhani, 2020).

Koneksi militer didefinisikan sebagai pengganti tingkat *governance* yang dibutuhkan dunia usaha untuk menurunkan biaya pinjaman mereka di negara-negara berkembang (Harsono & Kwok, 2019). Berdasarkan penelitian, militer di Indonesia juga berperan sebagai aktor politik, yang mempengaruhi hubungan ekonomi melalui dampak baik atau buruk hubungan militer dan politik (Crouch, 1978).

Menurut Harsono & Kwok (2019), anggota militer di Indonesia memiliki peran ganda, yaitu mereka dapat menggunakan otoritas politik mereka terhadap perusahaan terkait untuk mendapatkan keuntungan. Dalam situasi seperti ini, diharapkan para direktur yang memiliki ikatan militer diharapkan dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi bisnisnya. Akibatnya, bisnis yang memiliki ikatan militer biasanya memiliki keuntungan lebih dibandingkan bisnis yang tidak memiliki ikatan tersebut (Harsono & Kwok, 2019).

Menurut penelitian Xie & Hao (2017), CEO dengan pengalaman militer biasanya memiliki standar moral yang tinggi dalam menjunjung tinggi keterbukaan, meskipun hal ini berdampak kecil terhadap nilai perusahaan bagi pemegang saham. Menurut penelitian Widodo & Fanani (2020), kualitas audit dipengaruhi oleh pengalaman militer, sedangkan kualitas *profit margin* tidak berpengaruh. Namun penelitian yang dilakukan Fanani & Alfiyanti (2020) menunjukkan bahwa reputasi Perusahaan tidak terpengaruh oleh pengalaman militer.

Pada tanggal 13 April 2019 muncul video dokumenter di channel *Wacthdog Image* yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Video tersebut membahas sisi lain dari perusahaan pertambangan di Indonesia. Film dokumenter tersebut, banyak membahas dampak penambangan terhadap lingkungan dan dampak terhadap masyarakat sekitar, dampak tersebut seringkali menarik perhatian media. Selain itu, beberapa pejabat pemerintah atau partai politik yang terkait dengan politik juga dapat berperan dan memiliki tanggung jawab dalam bisnis di sektor pertambangan. Hal ini akan menyebabkan publik memiliki opinin yang tinggi tentang hubungan kedua hal tersebut (Wacthdog I, 2019).

Selain itu dilansir dari CCN Indonesia pada tanggal 24 Januari 2021, terdapat eks TNI Purnawirawan dan Polri yang terkonfirmasi memegang peranan penting dalam perusahaan tambang. Dalam paparan yang disampaikan, tokoh-tokoh dari unsur TNI meliputi mantan Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi (Komisaris PT Antam dan PT Toba sejahtera), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan (Komisaris PT Toba Bara Sejahtera), mantan Panglima TNI Laksamana (Purn) Agus Suhartono (Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk), Letnan Jendral (Purn) Agus Surya Bakti (Komisaris Utama PT Antam), Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy (Komisaris PT

Kutai Energy), Mayjen (Purn) Wardiyono (Direktur Utama PT Agtika Dwi Sejahtera), Letjen (Purn) Sintong Panjaitan (Komisaris PT Adimitra Baratama Nusantara dan PT Kutai Energy), Laksamana Muda (Purn) Syamsul Bahri (Komisaris PT Bintang Prima Energi Pratama), dan Marsekal (Purn) Djoko Suyanto (Komisaris PT Adaro Energy). Sementara dari unsur Polri terdapat nama-nama seperti, mantan Wakil Kabareskrim Irjen (Purn) Mathius Salempang (Komisaris PT Bukit Baiduri Energi dan Direktur PT Khotai Makmur Insan Abadi), mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Nugroho Djayusman (Komisaris PT Bintang Prima Energi Pratama), Irjen (Purn) Aryanto Sutadi (Direktur PT Energi Cahaya Industritama dan Direktur PT Dunia Usaha Maju), dan Irjen (Purn) Alpiner Sinaga (Direktur PT Energi Jaya Industritama dan Direktur PT Dunia Usaha Maju).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sutrisno & Fella (2020) yang meneliti tentang pengaruh *women on board* dan *political connection* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan *Infrastructure, Property, Consumer Goods*, dan *Miscellaneous* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menambahkan variabel baru yaitu pengalaman militer terhadap “nilai Perusahaan” dan objek yang digunakan pada penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2020.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali atas teori dan penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini ada empat variabel meliputi, keberadaan perempuan pada dewan direksi, keberadaan perempuan pada dewan komisaris, koneksi politik, dan pengalaman militer. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan. Objek dalam penelitian

ini meliputi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2015-2021. Sedangkan, untuk perbandingan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yang mana pada penelitian ini ada penambahan variabel pengalaman militer.

Alasan mengambil penelitian pada periode 2015 karena laporan ke-13 dari rangkaian laporan industri PwC, menyatakan bahwa 40 perusahaan pertambangan global terbesar mencatat kerugian bersih kolektif yang terjadi pertama kali dalam sejarah hingga (US\$27 miliar) pada tahun 2015. Pada tahun 2015 tidak ada perusahaan pertambangan di Indonesia dengan kapitalisasi pasar melebihi US\$4 miliar. Angka tersebut merupakan batas terendah agar dapat masuk dalam jajaran 40 perusahaan pertambangan terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar (Agung et al, 2017).

Gambar 1.1 Pergerakan Saham Sektor Pertambangan 2015



Sumber: Bareksa.com

Berdasarkan data pada gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa sampai dengan akhir periode tahun 2015 saham-saham di sektor pertambangan mengalami penurunan. Saham perusahaan pertambangan PT Adaro Energy Tbk

(ADRO) harus turun diangka 52,40%. Saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) juga harus turun diangka 63,20%. Perusahaan tambang lain yang terkena imbasnya adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang harga sahamnya harus rela turun diangka 71,27% di tahun 2015.

Selain itu, terdapat perkembangan dari penelitian sebelumnya, belum ada penelitian serupa yang menggunakan tiga variabel dalam penelitian ini, objek penelitian sebelumnya ada yang menggunakan perusahaan perbankan dan perusahaan-perusahaan manufaktur sedangkan pada penelitian ini studi kasusnya menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2015-2021. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memperhatikan pengalaman militer yang dimiliki oleh dewan perusahaan yang dapat membawa pengaruh terhadap nilai perusahaan, maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Keberadaan Perempuan, Koneksi Politik, dan Pengalaman Militer Pada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Apakah keberadaan perempuan di dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan tahun 2015-2022?
2. Apakah keberadaan perempuan di dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai Perusahaan sektor pertambangan tahun 2015-2022?
3. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan tahun 2015-2022?

4. Apakah pengalaman militer berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan tahun 2015-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh keberadaan perempuan di dewan direksi terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan tahun 2015-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh keberadaan perempuan di dewan komisaris terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan tahun 2015-2022
3. Untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan tahun 2015-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman militer terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan tahun 2015-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bagi penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

a. Bagi peneliti

Bisa dijadikan sarana untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan ilmu akuntansi terhadap nilai perusahaan yang diukur dari keberadaan perempuan, koneksi politik, dan pengalaman militer serta dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bisa menjadi acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai dasar dalam pengembangan ilmu akuntansi

terutama pada nilai perusahaan yang diukur dari keberadaan perempuan, koneksi politik, dan pengalaman militer.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi investor

Dapat memberikan masukan bagi investor dalam pengambilan keputusan melalui informasi dari nilai perusahaan dari adanya keberadaan perempuan, koneksi politik, dan pengalaman militer di dalam dewan direksi dan dewan komisaris.

b. Bagi perusahaan

Dapat memberikan masukan dan gambaran kepada pihak perusahaan tentang nilai perusahaan yang diukur dari keberadaan perempuan, koneksi politik, dan pengalaman militer di dalam dewan direksi dan dewan komisaris.